

Judul : Penempatan dana pemerintah: Anggota DPR dukung Purbaya
Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Penempatan Dana Pemerintah Anggota DPR Dukung Purbaya

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Ak mendukung langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memeriksa penempatan simpanan berjangka Pemerintah senilai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dari data Kemenkeu, simpanan berjangka Pemerintah meningkat signifikan dari Rp 204,1 triliun pada Desember 2023, jadi Rp 285,6 triliun per Agustus 2025. Sedangkan total simpanan Pemerintah Pusat di perbankan dan Bank Indonesia juga melonjak dari Rp 466 triliun pada akhir 2023, jadi Rp 635,2 triliun pada April 2025.

"Langkah ini bukan sekadar audit angka, melainkan fondasi untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap keuangan negara yang dikelola secara jujur dan bertanggung jawab," kata Amin dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, audit forensik terhadap seluruh penempatan dana Pemerintah merupakan langkah mutlak yang harus segera dilakukan. Pemeriksaan itu tidak boleh berhenti di angka nominal semata, melainkan menelusuri seluruh proses dan dasar kebijakan penempatan dana.

"Audit harus mencakup tingkat bunga per kontrak, tenor, nama bank penerima, serta dokumen persetujuan internal yang digunakan sebagai dasar penempatan," ujar politikus PKS itu.

Dia mendorong Kemenkeu membuka seluruh data secara transparan ke publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan adanya permainan bunga di bank-bank komersial. Dana publik dalam jumlah besar seharusnya memberi manfaat optimal bagi negara, bukan malah menimbulkan potensi kerugian akibat selisih bunga.

"Kalau bunga deposito lebih

rendah dari bunga utang, berarti negara rugi. Karena itu harus diperiksa sampai tuntas," tegasnya.

Amin juga menilai, perlu ada mekanisme kompetitif dan rotasi mitra perbankan agar penempatan dana tidak hanya berputar di lingkaran lembaga keuangan tertentu. Selain itu, aturan tentang pemisahan dana publik dan institusional perlu diterapkan dengan ketat.

"Setiap mata rantai pengambilan keputusan di kementerian, lembaga, dan perbankan harus bebas dari konflik kepentingan," ujarnya.

Legislator asal Dapil Jatim IV itu juga mendorong Purbaya untuk menetapkan tenggat waktu publik bagi audit tersebut, sekaligus menjamin perlindungan bagi pelapor pelanggaran atau *whistleblower*. Transparansi hasil investigasi jadi kunci mencegah praktik moral hazard di masa depan.

"Setelah hasilnya diumumkan, perlu disertai sanksi tegas bagi pihak yang terbukti menyimpang," katanya.

Menurut Amin, langkah berani eks Kepala Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara yang lebih bersih dan efisien. Tindakan tersebut mencerminkan komitmen serius pemerintah memperkuat prinsip *good governance*.

"Perbaikan kultur birokrasi memang tidak mudah, tapi integritas dan ketegasan Menteri Purbaya akan membawa perubahan nyata," ucapnya.

Dia berharap langkah ini tidak berhenti sebagai respons sesaat. Tapi jadi gerakan berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal negara.

"Audit ini momentum penting untuk menata ulang sistem keuangan negara agar lebih sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat," pungkasnya. ■ PYB